



► KEUANGAN DAERAH

Tahun Depan, Sektor Pajak Dipatok Naik 15%

UMBULHARJO—Target pendapatan asli daerah (PAD) untuk sektor pajak pada 2019 mendatang dipatok naik 15% ketimbang tahun ini. Salah satu pemicunya adalah kebijakan Pemkot yang akan menghapus dana stimulus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

*Abdul Hamid Razak
hamied@harianjogja.com*

Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Jogja Kadri Renggono mengatakan tahun depan kebijakan stimulus atau keringanan PBB akan dihapus seiring revisi perda yang kini masih dibahas di Dewan. Kenaikan target tersebut, kata Kadri berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang kurang dari 15%.

"Kami sudah mengkaji potensi PAD, sehingga tahun depan kami berani memasang target tinggi," kata dia, Selasa (11/9).

► Tahun ini Pemkot menargetkan pendapatan pajak daerah sebesar Rp357,45 miliar.

► Penetapan target harus diselaraskan dengan persoalan yang akan dihadapi Pemkot.

Tahun ini, dari 10 jenis pajak daerah Pemkot menargetkan pendapatan sebesar Rp357,45 miliar. Hingga akhir Agustus, realisasi pajak baru mencapai 60% atau senilai Rp212,8 miliar. Sisa waktu empat bulan hingga akhir tahun, akan dimaksimalkan Pemkot agar realisasi mencapai 100%.

Kadri mengatakan pajak hotel menjadi penyumbang terbesar dibanding sembilan sektor pajak daerah lainnya dengan target Rp121,5 miliar. Persentase kenaikan PBB pada 2019 mendatang diperkirakan naik tajam. "Oleh karena itulah, besar kemungkinan realisasi PBB tahun depan cukup tinggi," ucap Kadri.

Pemberian stimulus PBB itu sebelumnya diatur dalam Perwal Jogja No.92/2014 tentang Pemberian Stimulus PBB Kota Jogja pada 2015 dan Perwal Jogja No.80/2015 tentang

REALITA PAJAK KOTA JOGJA

Target 2018	Realisasi
: Rp357,45 miliar.	: Rp212,8 miliar.*

*hingga Agustus

Target PAD 2018

1. Hotel	: Rp112 miliar.
2. Restoran	: Rp34 miliar.
3. PBB	: Rp53 miliar.
4. BPHTB	: Rp65 miliar.

Sumber: wawancara (hari)

hal yang sama pada tahun berikutnya. Namun setelah adanya penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hingga enam kali, Pemkot pun secara bertahap mengurangi pemberian stimulus.

Penghapusan stimulus itu tak akan berdampak signifikan terhadap beban PBB sektor permukiman.

Pasalnya mekanisme penghitungan PBB untuk objek tempat tinggal dibedakan dengan objek komersil.

Wakil Ketua DPRD Jogja M Ali Fahmi menilai Pemkot masih bisa menaikkan target pajak karena hampir semua target pajak daerah masih di bawah proyeksi. "Penetapan target harus diselaraskan dengan persoalan yang akan dihadapi Pemkot."

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 November 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005